

Abstrak

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur tentang parate eksekusi Hak Tanggungan, tetapi pada penerapannya eksekusi tersebut terkendala ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan lelang parate eksekusi Hak Tanggungan pada KPKNL Semarang, hambatan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan pada KPKNL Semarang dan upaya mengatasinya dan Resiko-resiko yang dihadapi KPKNL Semarang dalam pelaksanaan lelang parate eksekusi hak tanggungan dan yang menanggung risikonya

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris* dengan pendekatan *kualitatif* yang bersumber pada data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan.

Menggunakan analisa *kualitatif* dapat disampaikan bahwa pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di KPKNL Semarang sesuai ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Hambatan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di KPKNL Semarang adalah adanya gangguan pelaksanaan lelang oleh debitor atau kuasa hukumnya dan sedikitnya peminat lelang, solusi dari masalah tersebut adalah menyerahkan eksekusi yang rawan konflik kepada pengadilan untuk dieksekusi dengan bantuan hakim, dan dibuatnya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang eksekusi Hak Tanggungan. Resiko yang timbul adanya gugatan perdata pada KPKNL Semarang, yang menanggung resiko penjual. Sarannya segera dibuat PP eksekusi hak tanggungan dan KPKNL Semarang sementara waktu tidak melakukan lelang parate eksekusi Hak Tanggungan.

Kata Kunci: Parate Eksekusi, Hak Tanggungan, KPKNL

ABSTRACT

Article 6 of Encumbrance Right Law regulates the parate execution of encumbrance right. However, in the implementation, the execution is in contrary with article 26 of Encumbrance Right Law.

The aims of the research were to recognize the implementation of parate execution auction of Encumbrance Right at KPKNL Semarang, the obstacles, the problem solving, and the risks faced by KPKNL Semarang in the implementation of parate execution auction of encumbrance right and those who bear the risks.

The research used the approach method of empirical-juridical with a qualitative approach using the primary data obtained from field study and the secondary data from library study.

By using a qualitative analysis, it is stated that the executions to encumbrance rights at KPKNL Semarang were in accordance with the provision in article 6 of Encumbrance Right Law. The obstacles in the implementation of the execution to encumbrance right at KPKNL Semarang were the disturbance in the implementation of auction by debtors or their advocates and only few auction participants. The solution to the problem is by giving the execution with conflict potentials to the court to be executed with the assistance of the judges. In addition, it is necessary to make a law which specifically regulates the execution of encumbrance right. The risks appeared were the civil lawsuit to KPKNL Semarang who bears the risk of the seller. It is recommended to make the Government Regulation (PP) for the execution of encumbrance right, and KPKNL Semarang temporarily does not perform the auction of the parate execution of encumbrance right.

Keywords: Parate Execution, Encumbrance Right, KPKNL